

BAB III

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini mendalami praktik penerapan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nyata dari program kebijakan Kartu Jateng Sejahtera, khususnya di Kabupaten Kendal, dengan tujuan utama untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam penerapan kebijakan ini. Data untuk penelitian ini bersumber melalui wawancara terstruktur yang melibatkan pengajuan serangkaian pertanyaan kepada berbagai individu yang menjadi informan penelitian. Subjek penelitian meliputi perwakilan Pemerintah Kabupaten Boja, pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kendal, dan pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini mempertimbangkan berbagai fenomena dan indikator penelitian, yang dirinci sebagai berikut:

- 1) Implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera
 - a. Verifikasi dan Validasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera
 - b. Pengusulan Calon Penerima Bantuan Kartu Jawa Tengah Sejahtera
 - c. Penerima Bantuan Jaminan Kartu Sosial Jawa Tengah Sejahtera
 - d. Penyaluran Kartu Jawa Tengah Sejahtera
- 2) Faktor Pendukung dan Penghambat Distribusi Kartu Jawa Tengah Sejahtera
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya

- c. Struktur Birokrasi
- d. Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan

Melalui kajian komprehensif terhadap aspek-aspek tersebut, bab ini berupaya memberikan gambaran mengenai implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam peluncuran program Kartu Jateng Sejahtera di Kabupaten Kendal.

3.1. Implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) Di Kabupaten Kendal

Berdasarkan data jumlah penerima manfaat Kartu Jawa Tengah Sejahtera di Kabupaten Kendal pada periode 2018 hingga 2023, terlihat adanya tren penurunan secara konsisten. Pada tahun 2018, jumlah penerima manfaat mencapai 744 orang, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 737 pada tahun 2019 dan tetap stabil pada angka yang sama pada tahun 2020. Penurunan lebih lanjut terjadi pada tahun 2021 dan 2022, di mana jumlah penerima manfaat masing-masing menjadi 732 dan 728. Tren penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2023, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 708 orang. Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan penurunan ini perlu dianalisis lebih lanjut, seperti perubahan kriteria penerima manfaat, pemutakhiran data, atau perubahan kebijakan.

Pelaksanaan pembagian Kartu Sejahtera Jawa Tengah di Kabupaten Boja menghasilkan pemberian manfaat kepada total 47 KK yang memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditentukan. Kriterianya mencakup individu yang menunjukkan disabilitas, menunjukkan produktivitas rendah, menderita penyakit kronis, dan tidak terlibat aktif dalam upaya produktif. Pada tahun 2022, Kartu

Jateng memberikan bantuan sebesar 750 ribu rupiah per penerima, dan rencananya akan ditingkatkan menjadi 1.110.000 ribu rupiah pada tahun 2023.



Gambar 3.1 Slip Transaksi Pencairan Bantuan Sosial

Alokasi bantuan ini dilakukan secara triwulanan yang terbagi dalam empat tahap per tahun, dengan pencairan dana dilakukan setiap tiga bulan sekali. Kajian ini terutama mengkaji implementasi Kartu Jateng Sejahtera, dengan fokus khusus pada komponen-komponen utama meliputi proses verifikasi dan validasi, kriteria seleksi calon yang memenuhi syarat, penerima Bantuan Jaminan Kartu Sosial Jateng Sejahtera, dan mekanisme penyalurannya Kartu Jawa Tengah Sejahtera.

Tabel 3.1

Data Penerima KJTS Kecamatan Boja

NO	Nama_Krt/Art (Penerima KJTS)	Nama_Kel	Nama_Kec	Nama_Kab
1	Kusyanto	Banjarejo	Boja	Kendal
2	Suharso	Banjarejo	Boja	Kendal
3	Sumari	Banjarejo	BOJA	KENDAL
4	Ary Suwantonono	Bebengan	Boja	Kendal

5	Djumirin	Bebengan	BOJA	KENDAL
6	Nurhadi	Bebengan	Boja	Kendal
7	Rohmad	Bebengan	BOJA	KENDAL
8	Suji Rahayu	Blimbing	Boja	Kendal
9	Apriyanto	Boja	Boja	Kendal
10	Fatimah	Boja	Boja	Kendal
11	Muhadi	Boja	Boja	Kendal
12	Mukinem	Boja	Boja	Kendal
13	Painah	Boja	BOJA	KENDAL
14	Prawoto	Boja	Boja	Kendal
15	Sudono	Boja	Boja	Kendal
16	Joko Bunyani	Kaligading	Boja	Kendal
17	Raminah	Karangmanggis	Boja	Kendal
18	Tutur Bamantoro	Karangmanggis	Boja	Kendal
19	Aminatun	Kliris	Boja	Kendal
20	Nurkhasanah	Kliris	BOJA	KENDAL
21	Uminah	Kliris	Boja	Kendal
22	Ridwan	Medono	Boja	Kendal
23	Rusdi	Meteseh	Boja	Kendal
24	Siti Rokomah	Meteseh	Boja	Kendal
25	Slamet Jumanto	Meteseh	Boja	Kendal
26	Sukriyanto	Meteseh	Boja	Kendal
27	Sutriyanto	Meteseh	Boja	Kendal
28	Agus Sunarto	Ngabean	Boja	Kendal
29	Fahrur Riza	Ngabean	Boja	Kendal
30	Koyimah	Ngabean	BOJA	KENDAL
31	Haryati	Pasigitan	Boja	Kendal
32	Karoli	Pasigitan	Boja	Kendal
33	Ngaderi	Pasigitan	Boja	Kendal
34	Ngateman	Pasigitan	BOJA	KENDAL
35	Sariyadi	Pasigitan	Boja	Kendal
36	Sukarmin	Pasigitan	Boja	Kendal
37	Surti	Pasigitan	Boja	Kendal
38	Bakri	Salamsari	Boja	Kendal
39	Dibyو	Salamsari	Boja	Kendal
40	Rebin	Salamsari	Boja	Kendal
41	Sonhaji Riyanto	Salamsari	Boja	Kendal
42	Zaenal Arifin	Salamsari	Boja	Kendal
43	Munoto	Tampingan	Boja	Kendal

44	Ziniyah	Tampingan	Boja	Kendal
45	Katik	Trisobo	BOJA	KENDAL
46	Paeno	Trisobo	Boja	Kendal
47	Subiyarti	Trisobo	Boja	Kendal

Data yang diberikan memberikan wawasan yang signifikan mengenai dinamika operasional program Kartu Sejahtera Jawa Tengah di Kabupaten Boja, serta perkembangan progresif kerangka dukungan keuangan selama program tersebut berlangsung. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan unsur-unsur dasar pelaksanaan program, yang mencakup evaluasi kriteria kelayakan dan penyaluran bantuan yang nyata.

3.1.1. Verifikasi dan Validasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera

Proses verifikasi dan validasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera merupakan tahapan kritis yang dilakukan melalui sumber data Tim Koordinasi Satu Kecamatan (TKSK). Sebelum TKSK mengajukan usulan, data yang menjadi dasar verifikasi diperoleh dari desa terkait, yang memastikan bahwa individu yang diajukan belum menerima bantuan, termasuk bantuan sosial dari provinsi atau Kementerian Sosial. Kartu Jateng Sejahtera secara spesifik ditujukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, seperti mereka yang mengalami disabilitas atau penyakit kronis. Program ini juga mendukung individu yang tidak produktif dalam mencari pekerjaan serta yang berada dalam kondisi berbaring di rumah tanpa aktivitas, dengan tujuan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan

mereka. Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan Pegawai Bidang Perlindungan Sosial dan Data Penyuluhan Dinas Sosial Kabupaten Kendal, yaitu:

“Untuk kartu Jateng sejahtera itu verifikasinya itu pertama kita itu dapat data itu dari TKSK, sebelum TKSK itu mulai mengajukan dia dapat usulan dari desa nih yang bersangkutan belum dapat bantuan, seumpama bansos lain dari provinsi dari kemensos. Jadi Jateng itu diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus, seperti disabilitas, orang yang berpenyakit kronis, dan yang tidak produktif bisa mencari pekerjaan, yang berbaring saja dirumah gak ngapa ngapain bisa kami bantu.” (Wawancara dengan Pegawai Bidang Perlindungan Sosial dan Data Penyuluhan Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023)

Petugas Bidang Perlindungan Sosial dan Penyuluhan Data, terlihat bahwa program Kartu Jateng Sejahtera memiliki prosedur verifikasi yang ketat. Program ini memperoleh datanya dari sistem TKSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), seperti yang dijelaskan oleh petugas. Selain itu, peraturan ini juga mengamanatkan agar masing-masing desa yang sebelumnya belum menerima bantuan sosial, harus mengajukan proposal. Tujuan utama program ini adalah untuk secara khusus melayani kelompok penerima tertentu, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas dan individu yang menderita penyakit kronis. Selain itu, program ini juga memberikan bantuan kepada individu yang mengalami produktivitas rendah dan menghadapi tantangan dalam mendapatkan pekerjaan, dengan menekankan tujuan membantu mereka yang mungkin kekurangan dukungan. Pernyataan yang diberikan oleh petugas dari Divisi Perlindungan Sosial dan Penyuluhan Data memberikan informasi berharga mengenai prosedur evaluasi yang cermat yang diterapkan untuk menjamin bahwa inisiatif Kartu Jateng Sejahtera secara efektif menjangkau

penerima manfaat yang ditunjuk yang benar-benar membutuhkan bentuk bantuan sosial ini.

“Pertama KK, KTP, dia harus domisili di kabupaten Kendal. Sama foto.” (Wawancara dengan Pegawai Bidang Perlindungan Sosial dan Data Penyuluhan Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara selanjutnya, Petugas Data Perlindungan dan Penyuluhan Sosial menekankan prosedur verifikasi yang ketat terkait dengan Kartu Jawa Tengah Sejahtera, dan menggarisbawahi pentingnya dokumentasi khusus. Petugas menyatakan bahwa untuk dapat mengikuti program ini, seseorang harus memiliki domisili di wilayah Kendal dan menunjukkan foto yang sesuai pada KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Persyaratan yang disebutkan di atas menyoroti pentingnya dokumentasi yang tepat dan seragam dalam menjamin kualifikasi program.

“Kan ada permohonan nih dari dinas ehTKSK yang dari lapangan misal kabupaten Kendal, kita mengecek semua berkas yang diajukan dari KK, KTP, sama foto. Apabila itu tidak ada KTP.e, e-ktp kan sekarang pakai elektronik. Kalau ODGJ itu kan susah ya mas, orangnya lari padahal kita butuh, nah yang kita butuhkan KK saja.” (Wawancara dengan Pegawai Bidang Perlindungan Sosial dan Data Penyuluhan Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023)

Pada wawancara ketiga, aparat penegak hukum berdiskusi mengenai kesulitan yang dihadapi saat melakukan proses verifikasi, dengan penekanan khusus pada tantangan unik yang ditimbulkan oleh Individu Penyandang Disabilitas (ODGJ). Meskipun orang-orang ini perlu mendapatkan bantuan, petugas menyadari adanya tantangan dalam memperoleh KTP yang akurat. Pentingnya Kartu Keluarga (KK) sebagai persyaratan menunjukkan perannya dalam menentukan kelayakan seseorang untuk mendapatkan Kartu Jateng

Sejahtera. Hal ini terutama relevan dalam situasi di mana memperoleh KTP menimbulkan kesulitan. Wawancara yang dilakukan memberikan wawasan berharga mengenai elemen pragmatis verifikasi dan kesulitan yang dihadapi selama implementasi program.

“Dikasih waktu sama provinsi itu paling nggak satu minggu, tapi setelah ee kalau di dinsos sih sebenarnya kalau berkas sudah terkumpul itu hanya cuma berapa ya? Kabupaten Kendal itu sedikit, gak ada 1000 lah, 600, an. Kalau setiap tahap pencairan kan kadang yang bersangkutan sudah dapat bansos dari kemensos, jadi berkurang lagi tahapannya kita.” (Wawancara dengan Pegawai Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara kali ini, pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kendal menyoroti efisiensi proses verifikasi dan validasi Kartu Jateng Sejahtera yang dilakukan dinasny. Penyebutan jangka waktu satu minggu menandakan kecepatan operasional Dinas Sosial dalam memproses berkas yang terkumpul. Pendekatan yang efisien ini kemungkinan besar disebabkan oleh luasnya wilayah Kabupaten Kendal yang dapat dikelola, dengan sekitar 600 pelamar. Hal ini menggarisbawahi sifat lokal dan terorganisir dari proses verifikasi di Kabupaten Kendal, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program di wilayah yang lebih kecil memungkinkan penanganan pemohon yang lebih cepat dan efektif, memastikan bahwa individu yang memenuhi syarat menerima dukungan pada waktu yang tepat.

“Kalau cetak kartu kita mengusulkan kedinas sosial provinsi karena mereka yang punya kewenangan untuk mencetak kartu jadi kita kabupaten tidak tau kapan harus cetak kartu.” (Wawancara dengan Pegawai Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara tersebut, Pekerja Sosial Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan menunjukkan adanya pertimbangan penting dalam proses verifikasi dan validasi Kartu Jateng Sejahtera. Orang yang diwawancarai menyoroti kemungkinan bahwa individu mungkin sudah menjadi penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, yang dapat berdampak pada tahapan penyaluran program. Pengamatan ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara berbagai program bantuan sosial untuk mencegah duplikasi dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien. Hal ini juga menunjukkan perlunya pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan terhadap program Kartu Sejahtera Jawa Tengah agar dapat beradaptasi dengan kondisi penerima manfaat yang terus berkembang, sehingga wawasan orang yang diwawancarai sangat penting untuk pengelolaan program yang efektif.

“Biaya pembuatan kartu tidak dikenakan biaya sama sekali. Selain tadi sementara tidak mas, karena itu aturan juknis dari dinas sosial provinsi, Cuma kriteria itu yang diperbolehkan.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dibahas aspek penting dari program Kartu Jateng Sejahtera. Pernyataan tersebut mengklarifikasi bahwa tidak ada biaya yang terkait dengan proses permohonan kartu, sehingga menyoroti aksesibilitas dan keadilan program, yang sangat penting untuk menjangkau individu yang membutuhkan dukungan. Selain itu, pernyataan bahwa program ini tidak bersifat sementara menggarisbawahi stabilitas dan komitmennya untuk membantu penerima yang memenuhi syarat, sebagaimana ditentukan oleh peraturan teknis dari dinas sosial provinsi.

Pemahaman ini menegaskan kembali sifat jangka panjang program dan fokusnya pada penyediaan bantuan berkelanjutan bagi mereka yang memenuhi kriteria yang ditentukan, sehingga berkontribusi terhadap keberlanjutan dukungan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kendal.

“Dari kabupaten tidak menentukan karena itu kan program dari provinsi. Kita hanya mengikuti arahan, prosedur dari dinsos provinsi.” (Wawancara dengan Pegawai Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara ini, Pekerja Sosial Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan menggarisbawahi struktur hierarki program Kartu Sejahtera Jawa Tengah, menekankan bahwa kabupaten tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kriteria dan prosedur program karena merupakan inisiatif provinsi. Pemahaman ini menunjukkan pendekatan program yang bersifat top-down, dimana kabupaten setempat seperti Kabupaten Kendal mengikuti arahan dan pedoman yang ditetapkan oleh dinas sosial provinsi. Kontrol terpusat ini menjamin keseragaman dan konsistensi pelaksanaan program di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Pernyataan narasumber menyoroti pentingnya kepatuhan dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas dan efektivitas program Kartu Jateng Sejahtera.

“Itu dari pengusulan desa, kemudian kami verifikasi masuk dalam kategori apa tidak baru kita ajukan melalui dinas sosial. Itu kita ambil dari mereka yang masuk kriteria ada disabilitas mental, kedua mereka yang berpenyakit kronis menahun mungkin dia sampai stroke, sampai harus cuci darah terus, demikian yang kita ambil, menjadi penerima manfaat dari KJTS.” (Wawancara dengan Camat Boja, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara kali ini pegawai Camat Boja menguraikan tentang proses sistematis verifikasi dan validasi program Kartu Jateng Sejahtera. Orang

yang diwawancarai menjelaskan bahwa kelayakan program ditentukan berdasarkan usulan yang diterima dari pemerintah desa. Proposal ini kemudian harus diverifikasi untuk menilai apakah pelamar memenuhi kriteria tertentu. Orang yang diwawancarai menyebutkan bahwa penerima manfaat program ini dipilih dari dua kategori utama: individu dengan disabilitas mental dan mereka yang menderita penyakit kronis jangka panjang, yang mungkin memerlukan perawatan medis intensif seperti cuci darah. Wawasan ini menyoroti pendekatan program yang terstruktur dan terarah dalam memberikan dukungan kepada individu yang paling membutuhkan, khususnya mereka yang menghadapi tantangan kesehatan yang signifikan.

“Iya paswa itu TKSK, dari pengajuan jelas dari desa, kemudian verifikasi kita, kalau pencairan bantuan bisa kolektif kalau mandiri bisa diambil sendiri dengan membawa kartu begini. Tapi kebanyakan disuruh minta tolong mengambilkan, karena kebanyakan penerima manfaat ya nyuwun sewu kalau ODGJ dia dibawa ke bank ya bawa masalah, kalau dia penyakit menahun sudah stroke terutama leh ngotong ngotong ya.” (Wawancara dengan Camat Boja, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara tersebut, pegawai Camat Boja memberikan masukan berharga mengenai proses pendistribusian setelah verifikasi dan validasi program Kartu Jateng Sejahtera. Narasumber menyebutkan bahwa setelah proses verifikasi selesai, pencairan bantuan dapat dilakukan secara kolektif atau, dalam beberapa kasus, penerima manfaat dapat mengambilnya secara mandiri dengan menunjukkan kartunya. Namun, pihak yang diwawancarai mencatat bahwa sebagian besar penerima manfaat terdorong untuk mencari bantuan dalam memperoleh dukungan mereka, terutama ketika mereka menghadapi tantangan seperti menjadi Individu Penyandang Disabilitas (ODGJ) atau menderita penyakit

kronis, termasuk mereka yang pernah mengalami stroke. Hal ini menggarisbawahi pertimbangan program terhadap kebutuhan praktis dan keterbatasan yang dihadapi oleh penerima bantuan, memastikan bahwa proses distribusi bantuan dapat diakses dan mendukung, terutama bagi mereka yang mungkin kesulitan dalam melakukan pengumpulan dana atau transaksi perbankan secara mandiri.

“Dokumen usulan ya KTP, KK, kalau nanti sudah punya KTP ya diusulin, kalau belum ya pengurusan KTP di dukcapil. Kalau sudah diusulkan di kabupaten kota, mengusulkan ke dinsos provinsi dengan rekomendasi dan SWTJM gitu. Yang diperlukan ya harus mengunjungi ke calon penerima, mengunjungi rumah, home visit, setelah itu melihat kondisi ekonomi miskin apa gak, sesuai penerima KJTS apa gak, kalau tidak sesuai kan tidak bisa diusulkan, kalau sesuai baru kita usulkan.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara ini dijelaskan proses pengusulan penerima manfaat program Kartu Sejahtera Jateng. Narasumber menguraikan bahwa dokumen yang diperlukan untuk melamar antara lain KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga). Apabila pemohon tidak memiliki KTP, maka dibimbing untuk memulai proses permohonan KTP di Dukcapil (Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Setelah proposal disusun di tingkat kabupaten atau kota, selanjutnya diajukan ke dinas sosial provinsi dengan disertai rekomendasi dan SWTJM (Kartu Keluarga Sejahtera). Elemen kunci dari proses ini adalah perlunya kunjungan rumah untuk menilai kondisi ekonomi calon penerima dan menentukan apakah mereka memenuhi kriteria penerima Kartu Jateng Sejahtera. Hanya jika kondisinya sesuai dengan kriteria program barulah proposal dapat diajukan. Wawasan wawancara ini menggarisbawahi evaluasi menyeluruh dan langsung

yang dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan diarahkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

“Verifikasi lapangan tentunya yang nanti di dinsos Kendal di TKSKnya, sana yang tau persis teknis lapangan. Saya kira tidak berhari hari, satu hari cukup. TKSK di satu kecamatan kan satu, calon penerima kan didesa desa. Itu paling satu hari cukup Verifikasi dan validasi itu satu, disini disingkatnya verval, verifikasi validasi, diverifikasi terus sudah sesuai kriteria divalidasi.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara ini dibahas proses verifikasi dan validasi Kartu Jateng Sejahtera. Narasumber menjelaskan bahwa verifikasi lapangan dilakukan di kantor TKSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang berada di bawah Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Orang yang diwawancarai menekankan efisiensi proses ini, dan menekankan bahwa proses ini biasanya hanya membutuhkan waktu satu hari. Karena setiap kecamatan memiliki TKSK masing-masing, dan calon penerima manfaat tersebar di berbagai desa, proses verifikasi diselenggarakan untuk mencakup semua pemeriksaan yang diperlukan dalam satu hari. Orang yang diwawancarai juga mencatat bahwa verifikasi dan validasi sering disebut sebagai “verval” di sini dan menjelaskan bahwa proses verifikasi memastikan bahwa data sejalan dengan kriteria yang ditetapkan sebelum divalidasi. Wawasan wawancara ini menggarisbawahi pendekatan yang efisien dan sistematis untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima manfaat, yang membantu memastikan bahwa program menjangkau mereka yang benar-benar memenuhi kriteria secara efisien dan tanpa penundaan yang tidak perlu.

Penyelenggaraan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kabupaten Kendal mencakup beberapa unsur penting, dan prosedur verifikasi dan validasi

menjadi hal yang sangat penting. Program ini memperoleh datanya dari sistem TKSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang menyoroti ketergantungannya pada analisis data untuk mengidentifikasi penerima manfaat, khususnya mereka yang memiliki kebutuhan khusus, penyakit kronis, atau produktivitas rendah. Selain itu, pencantuman ketentuan yang mengamankan desa-desa yang belum memiliki akses terhadap bantuan sosial untuk mengajukan proposal berfungsi untuk secara efektif menargetkan dan mengalokasikan sumber daya kepada individu dan komunitas yang benar-benar membutuhkan jenis dukungan sosial tertentu. Pengamatan yang dilakukan oleh Kepala Divisi Perlindungan Sosial dan Penjangkauan Data menjelaskan prosedur penilaian ketat yang bertujuan untuk memastikan cakupan yang efisien pada penerima yang dituju.

Agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam program, individu diharuskan untuk memberikan bukti tempat tinggal mereka di Kendal, serta menunjukkan foto yang sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Persyaratan di atas menekankan pentingnya dokumentasi yang akurat dan konsisten untuk menentukan kelayakan program. Pada wawancara ketiga, aparat penegak hukum berdiskusi mengenai kendala-kendala yang dihadapi selama proses verifikasi, khususnya tantangan-tantangan yang dihadapi ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Para penulis mengakui adanya tantangan dalam memperoleh KTP yang akurat dan menyoroti pentingnya Kartu Keluarga (KK) sebagai prasyarat, khususnya dalam situasi di mana memperoleh KTP sulit dilakukan. Pengamatan ini menggarisbawahi unsur-unsur praktis verifikasi dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Acuan jangka waktu pemrosesan selama satu minggu menyiratkan fokus pada efisiensi operasional dalam pengelolaan dokumen yang telah terakumulasi. Efisiensi yang diamati dapat dikaitkan dengan skala Kabupaten Kendal yang relatif kecil dan jumlah pelamar yang diperkirakan mencapai 600 orang. Proses verifikasi di Kabupaten Kendal bercirikan bersifat lokal dan terorganisir dengan baik. Pendekatan ini menekankan penerapan proses di tingkat kabupaten yang lebih kecil, yang telah terbukti bermanfaat dalam mempercepat dan meningkatkan proses pemohon. Oleh karena itu, hal ini memastikan bahwa individu yang memenuhi syarat segera menerima dukungan yang menjadi hak mereka.

Potensi individu untuk menjadi penerima bantuan sosial yang disediakan oleh Kementerian Sosial, yang dapat berdampak pada tahap penyaluran program. Hal ini menyoroti pentingnya koordinasi yang efektif di antara berbagai program bantuan sosial untuk menghindari redundansi dan mendorong alokasi sumber daya yang optimal. Selain itu, hal ini menggarisbawahi pentingnya pemantauan berkelanjutan dan modifikasi yang diperlukan untuk menyelaraskan program KJTS dengan kondisi penerima manfaat yang berubah, sehingga menyoroti peran penting dari wawasan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai dalam memfasilitasi pengelolaan program yang efektif.

Tidak ada biaya tambahan sehubungan dengan prosedur permohonan kartu menunjukkan inklusivitas dan ketidakberpihakan program, yang penting untuk menjangkau individu yang membutuhkan bantuan secara efektif. Selain itu, pernyataan bahwa program ini bersifat non-sementara menunjukkan daya tahan dan dedikasinya dalam membantu penerima yang memenuhi syarat, sebagaimana

digambarkan dalam ketentuan teknis badan kesejahteraan sosial daerah. Pernyataan ini menggarisbawahi sifat program yang bertahan lama dan komitmennya untuk menyalurkan bantuan berkelanjutan kepada individu yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga memperkuat kelangsungan bantuan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kendal dalam jangka panjang.

3.1.2. Pengusulan Calon Penerima Bantuan Kartu Jawa Tengah Sejahtera

Proses pengusulan calon penerima bantuan Kartu Jawa Tengah Sejahtera mengikuti alur tertentu di tingkat kabupaten dan kota. Dalam contoh ini, di Kabupaten Kendal, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dilakukan secara lokal. Setiap kecamatan di Kendal memiliki Tim Koordinasi Satu Kecamatan (TKSK) yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi (verval) terhadap calon penerima bantuan. Setelah melalui proses verval, TKSK mengusulkan calon penerima bantuan ke Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Keputusan untuk menyetujui dan mengapprove usulan tersebut diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal, dan selanjutnya, usulan yang telah disetujui akan diajukan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menjelaskan alur ini dalam wawancara yaitu:

“Alurnya kana da di kabupaten kota, kalau misal panjenengan ini di Kendal ya kita memberdayakan SDM di Kendal. Di Kendal kita mempunyai TKSK tiap kecamatan yang melakukan verval itu TKSK. TKSK setelah verval diusulkan ke dinsos kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal nanti yang menyetujui yang mengapprove usulan itu ke dinsos provinsi seperti itu.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara tersebut, pegawai Dinas Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memberikan gambaran jelas mengenai proses verifikasi dan validasi program Kartu Jateng Sejahtera. Narasumber menjelaskan alur kegiatan yang berurutan, menekankan pada pemberdayaan sumber daya manusia lokal di Kendal melalui kehadiran TKSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di setiap kecamatan yang bertanggung jawab melakukan verifikasi. Setelah verifikasi awal, usulan tersebut kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kendal, yang berperan penting dalam menyetujui dan meneruskannya ke Dinas Sosial Provinsi. Gambaran ini menyoroti sifat desentralisasi dari proses verifikasi, dimana sumber daya lokal dimanfaatkan untuk memastikan identifikasi penerima manfaat yang memenuhi syarat secara efektif dan tepat sebelum meminta persetujuan dari otoritas di tingkat yang lebih tinggi. Desentralisasi tersebut mendorong pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap program Kartu Jawa Tengah Sejahtera di Kabupaten Kendal.

“Ya kan di kabupaten kota, kalau usulan kan sudah masuk dinas sosial provinsi, nanti dinsos provinsi memproses penciran bansos. Kita kalau melakukan verval ke kabupaten kota, kalau ke dinsos provinsi gak mampu, karena kan SDM nya sedikit, dikabupaten kota desanya berapa, gak mampu.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara kali ini, informan menyoroti tantangan praktis terkait proses verifikasi dan validasi program Kartu Jateng Sejahtera. Pihak yang diwawancarai mengakui bahwa setelah usulan tersebut diserahkan ke dinas sosial provinsi, maka menjadi tanggung jawab dinas provinsi untuk menangani pendistribusian bantuan sosial. Namun, orang yang diwawancarai juga menunjukkan bahwa melakukan verifikasi di kabupaten kota merupakan upaya

yang membutuhkan banyak sumber daya karena banyaknya desa di wilayah tersebut. Pengamatan ini menggarisbawahi keterbatasan sumber daya manusia dan kendala keuangan, sehingga tidak praktis untuk memperluas proses verifikasi ke kabupaten kota. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang seimbang dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memastikan bahwa penerima manfaat yang memenuhi syarat menerima bantuan sekaligus mengelola operasi program secara efisien, khususnya di wilayah padat penduduk.

“Di tahun 2022 awal ada tambahan satu kriteria, dulu juga gitu gak menerima bantuan apapun, tapi masih ada apa ya toleransi kalau benar benar membutuhkan sekali bisa, tapi diawal 2022 sudah tidak ada toleransi kalau dia sudah menerima bantuan dari pusat itu suruh milih, milih KJTS atau yang dari pusat. Dari pusat contohnya PKH. Itu dari awal kita ada 47, sekarang ada 32, karena terganjal dengan aturan yang sekarang. Ada lagi kemaren datanya muncul, kalau dia menerima bantuan lain ya nanti ditahun 2024 ya tetep kita cut.” (Wawancara dengan Camat Boja, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara kali ini, pegawai Dinas Sosial Kabupaten Kendal menyoroti adanya perubahan penting dalam kriteria program Kartu Jateng Sejahtera. Orang yang diwawancarai menyebutkan bahwa pada awal tahun 2022, kriteria tambahan diperkenalkan. Meskipun sebelumnya terdapat toleransi bagi individu yang telah menerima bantuan dalam bentuk lain, toleransi ini akan berubah. Secara khusus, individu diharuskan memilih antara Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) atau bantuan dari pusat, seperti PKH (Program Keluarga Harapan). Perubahan kebijakan ini menyebabkan penurunan jumlah penerima manfaat dari 47 menjadi 32, terutama karena kepatuhan terhadap peraturan baru. Selain itu, narasumber menyebutkan bahwa data yang menunjukkan penerimaan bantuan dalam bentuk lain akan mengakibatkan penghentian dukungan KJTS pada tahun 2024. Wawasan wawancara ini menggambarkan sifat kriteria program yang

terus berubah dan pentingnya menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat sambil memastikan efisiensi. alokasi sumber daya kepada mereka yang paling membutuhkannya.

Proses verifikasi dan validasi program difasilitasi oleh sistem TKSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ada di setiap kecamatan. Sifat desentralisasi sistem ini terlihat dari penerapannya yang luas. Hal ini memfasilitasi penerapan metode identifikasi yang disesuaikan dan menjamin partisipasi aktif sumber daya manusia lokal dalam proses verifikasi awal. Pembentukan TKSK (Pusat Pelayanan Terpadu Masyarakat) di tingkat daerah menawarkan pendekatan pragmatis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses, sekaligus memastikan keselarasan dengan kebutuhan unik masyarakat di Kabupaten Kendal. Penerapan pendekatan desentralisasi tidak hanya meningkatkan persepsi kepemilikan masyarakat namun juga memungkinkan pemerintah daerah mengawasi proses verifikasi secara efektif.

Keterbatasan dalam memperluas proses verifikasi ke wilayah perkotaan menjadi jelas ketika mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Hal ini menyoroti pentingnya pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien untuk menjamin bahwa masyarakat di wilayah padat penduduk menerima bantuan yang diperlukan. Kemampuan untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi dan keterbatasan sumber daya merupakan elemen penting dalam proses implementasi program. Pendekatan di atas memberikan contoh sulitnya memberikan bantuan sosial di berbagai wilayah geografis dan demografi di Kabupaten Kendal. Parameter

dinamis yang mengatur program Kartu Sejahtera Jawa Tengah menjadi topik pembicaraan yang penting selama wawancara. Kemampuan program untuk beradaptasi terhadap perubahan kebijakan pemerintah ditunjukkan dengan penerapan kriteria baru dan tidak memberikan keringanan hukuman terhadap individu yang menerima bantuan jenis lain. Penurunan jumlah individu yang menerima manfaat sebagai akibat dari perubahan ini menunjukkan pentingnya mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sekaligus memastikan distribusi sumber daya yang efektif kepada individu yang membutuhkan bantuan. Modifikasi kriteria program yang disebutkan di atas menggarisbawahi kelancaran program bantuan sosial dan pentingnya pengawasan dan penyesuaian yang berkelanjutan untuk menjaga efektivitasnya.

Secara umum, hasil ini memberikan wawasan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi, kesulitan yang terkait dengan keterbatasan sumber daya, dan kemampuan program untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan. Strategi pelaksanaan program KJTS di Kabupaten Kendal memerlukan keseimbangan antara pemberdayaan daerah dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendistribusikan bantuan sosial secara efektif kepada individu yang paling membutuhkan, sekaligus mengatasi kendala-kendala praktis. Wawancara yang dilakukan menyoroti karakteristik program kesejahteraan sosial yang rumit dan selalu berubah di Indonesia.

3.1.3. Penerima Bantuan Jaminan Kartu Sosial Jawa Tengah Sejahtera

Dalam konteks penerima bantuan jaminan Kartu Sosial Jawa Tengah Sejahtera, data terkini menunjukkan bahwa jumlah penerima saat ini mencapai 32 dari total 47 yang diidentifikasi. Sejak awal implementasi pada tahun 2018, jumlah penerima bantuan secara signifikan meningkat dari 11 orang. Proses validasi terus dilakukan untuk memastikan keabsahan data, dan saat ini mencakup seluruh 47 penerima yang telah terverifikasi. Dalam perjalanan waktu, beberapa perubahan terjadi pada status penerima, seperti kematian atau perubahan kondisi lainnya, sehingga jumlah penerima bantuan dapat berfluktuasi. Camat Boja, dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Sekarang 32 dari 47. Pertama kali tahun 2018 itu hanya 11, kemudian ditemukan, validasi validasi sampai 47 itu. ada yang meninggal, berkurang, bahkan ada yang banyak meninggal sampai 19 kalau gak salah. Begitu ada bansos yang gak keluar, kita ajukan. Kadang dari pusat ada yang gak keluar, kita ajukan. Kalau saat ini ada 32.” (Wawancara dengan Camat Boja, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara ini, digambarkan lanskap perkembangan penerima Bantuan Jaminan Kartu Sosial Sejahtera di Jawa Tengah. Orang yang diwawancarai menunjukkan perubahan jumlah penerima dari waktu ke waktu. Pada tahun 2018, penerimanya hanya 11 orang, namun melalui proses validasi bertambah menjadi 47 orang. Narasumber juga mencatat, seiring berjalannya waktu, ada beberapa penerima yang meninggal dunia sehingga jumlahnya menjadi 19 orang. Namun Bupati menekankan komitmen untuk memastikan bahwa semua penerima manfaat yang memenuhi syarat menerima bantuan sosial mereka, dan ketika bantuan dari pemerintah pusat tertunda atau tidak datang, pemerintah daerah akan mengambil langkah proaktif untuk mengajukan permohonan bantuan.

Hingga tanggal wawancara, saat ini ada 32 penerima. Wawasan ini mencerminkan sifat dinamis dari program ini, serta dedikasi pemerintah daerah untuk beradaptasi dan memastikan bahwa dukungan sosial menjangkau mereka yang membutuhkan, bahkan ketika menghadapi tantangan dan perubahan jumlah penerima.

*“Artinya mempelajari juknis dulu , penerima KJTS yang perlu didata siapa saja, yang mempunyai penyakit kronis, penyakit kronis apa saja, ada stroke ada jantung, ada TBC, disana ada, ada disabilitas , mental atau psikotik, disabilitas berat. Disana ada, jenengan pelajari dulu di juknisnya, kriterianya apa. Kalau gak sesuai dengan kriteria kan gak bisa diusulkan ke dinsos provinsi.”
(Wawancara dengan Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 5 Oktober 2023)*

Dalam wawancara ini dibahas tentang kriteria pemilihan penerima Bantuan Jaminan Kartu Sosial Sejahtera Jawa Tengah. Orang yang diwawancarai menggarisbawahi pentingnya memahami pedoman teknis secara menyeluruh, menekankan bahwa penerima harus memenuhi kriteria tertentu, terutama bagi individu dengan penyakit kronis, termasuk kondisi seperti stroke, serangan jantung, dan tuberkulosis, serta penyandang disabilitas, termasuk gangguan mental atau mental yang parah. disabilitas psikotik. Orang yang diwawancarai menyoroti kepatuhan yang ketat terhadap kriteria ini, yang menunjukkan bahwa hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang ditentukan yang dapat diusulkan untuk mendapatkan bantuan ke departemen layanan sosial provinsi. Pemahaman ini menggarisbawahi pentingnya kriteria kelayakan yang ketat untuk memastikan bahwa program ini secara efektif menasar individu-individu dengan kebutuhan paling mendesak, dan hal ini menekankan perlunya pemahaman yang jelas mengenai kriteria ini di antara mereka yang terlibat dalam administrasi program.

“Masih ada yaa, dulu memang ada kebijakan walaupun yang bersangkutan itu sudah dapat bansos dari bansos, tapi tetap mendapat KJTS gitu, itu karena kebijakan dari provinsi yang bersangkutan, kita melihat sudut pandang yang bersangkutan itu benar benar gak mampu, sangat membuthkan sekali atau hanya sekedar membuthkan atau ditengah tengah. Kalau yang benar benar butuh banget masih diusulkan. Tapi yang sudah terbantu lah dengan anak, keluarga nah itu tidak kita usulkan, dikembalikan, itu dulu. Kalau sekarang ya tidak. Ya mungkin ada beberapa sih mas, tapi yo semoga tidak karena memang kebijakan tahun 2022 itu sudah tidak diperbolehkan.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal ini, disoroti adanya perubahan kebijakan mengenai kelayakan penerima Bantuan Jaminan Sosial Kartu Sosial Sejahtera Jawa Tengah. Narasumber menjelaskan bahwa pada masa lalu, individu yang telah menerima bantuan sosial lainnya masih berhak mendapatkan Kartu Jateng Sejahtera, terutama berdasarkan kebijakan provinsi yang mempertimbangkan kebutuhan asli orang tersebut. Namun, kebijakan ini telah berubah, dan pada tahun 2022, kriteria kelayakan menjadi lebih ketat, tidak mengizinkan individu yang telah menerima bantuan dari sumber lain. Orang yang diwawancarai menekankan pentingnya menyelaraskan dengan kebijakan yang diperbarui, menandakan pergeseran ke arah dukungan yang lebih bertarget dan diatur, memastikan bahwa bantuan diarahkan kepada mereka yang paling membutuhkan. Wawasan ini mencerminkan kemampuan program untuk beradaptasi dan penekanan pada kepatuhan terhadap perubahan pedoman kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan distribusi bantuan.

“Tadi sudah saya sampaikan didesa ditemukan disabilitas, tidak menerima bantuan apapun atau mereka itu penyakit kronis, tidak menerima bantuan apapun

kemudian nama nama itu dilaporkan ke saya, kemudian saya saya menyampaikan ke laptu, dari itu nanti di pencairan berikutnya muncul apa gak nama nama itu, tapi sebelum muncul nama nama itu mesti ada validasi data dulu, validasi data pastinya dari nama nama ini kira kira ada yang meninggal apa tidak, ada yang pindah atau tidak atau ada yang sudah mampu atau tidak, kadang ada warga yang tidak mau dibantu karena dari luar mampu karena warisan gede.” (Wawancara dengan Camat Boja, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara ini, dirinci proses identifikasi penerima Bantuan Jaminan Kartu Sosial Sejahtera Jawa Tengah. Orang yang diwawancarai menjelaskan bahwa para calon pada awalnya diidentifikasi di desa jika mereka memenuhi kriteria tertentu, seperti cacat atau mempunyai penyakit kronis, namun tidak menerima bantuan apa pun. Nama-nama mereka kemudian dilaporkan dan disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk dievaluasi lebih lanjut. Namun, sebelum nama-nama tersebut dapat muncul dalam daftar pencairan, ada langkah penting yang harus dilakukan yaitu validasi data, yang bertujuan untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan. Proses validasi ini mencakup verifikasi apakah seseorang telah meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, atau benar-benar membutuhkan bantuan. Orang yang diwawancarai juga mengakui bahwa beberapa warga yang memiliki usaha sendiri dan tidak merasa membutuhkan bantuan menolak bantuan, seringkali karena mereka dianggap mampu secara finansial, terutama jika mereka mewarisi aset yang besar. Wawasan ini menyoroti pendekatan multi-langkah dan tekun untuk memastikan bahwa bantuan mencapai penerima yang dituju dengan tetap mempertimbangkan berbagai keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Agar dapat secara efektif menysasar individu-individu dengan kebutuhan paling mendesak, kriteria pemilihan penerima diikuti dengan ketat. Kriteria yang disebutkan di atas terutama menysasar individu yang memiliki penyakit kronis dan disabilitas, sehingga memberikan penekanan yang signifikan pada perlunya penyelenggara program untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pedoman teknis. Dimasukkannya kriteria kelayakan yang jelas berfungsi untuk memastikan bahwa bantuan tersebut ditujukan kepada individu yang benar-benar membutuhkannya, sehingga meningkatkan efektivitas dan kesetaraan program.

Selain itu, Kemampuan program untuk beradaptasi terhadap kebijakan terkini ditunjukkan dengan penerapan kriteria yang lebih ketat, yang kini mengecualikan individu yang telah menerima bantuan dari sumber lain. Tujuan dari modifikasi ini adalah untuk meningkatkan ketepatan dan pengawasan tindakan bantuan, sehingga memastikan bahwa bantuan diarahkan kepada individu yang paling membutuhkan. Dedikasi program ini terhadap efisiensi dan keadilan dalam distribusi bantuan ditegaskan oleh fokusnya pada kepatuhan terhadap kebijakan.

Proses implementasi KJTS melibatkan serangkaian tahapan yang berurutan, dimulai dengan identifikasi penerima manfaat di tingkat lokal, dengan menggunakan kriteria tertentu. Selanjutnya, data yang dikumpulkan menjalani proses validasi menyeluruh, dengan menekankan pada tindakan hati-hati yang dilakukan untuk menjamin keakuratan alokasi bantuan kepada penerima yang ditunjuk. Pengakuan terhadap individu yang mungkin menolak bantuan karena status keuangan atau warisan aset yang besar menyoroiti komitmen program untuk mengatasi beragam kondisi dan kebutuhan masyarakat.

3.1.4. Pembagian Kartu Jawa Tengah Sejahtera

Proses penyaluran Kartu Jawa Tengah Sejahtera di Kabupaten Kendal memiliki batasan kuota yang ditetapkan sejak awal implementasi program. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal mengungkapkan bahwa kuota maksimal untuk Kabupaten Kendal bervariasi setiap tahun, bergantung pada alokasi anggaran dan kebijakan yang ada. Pada tahun sebelumnya, maksimalnya mencapai sekitar 700 penerima, dengan jumlah yang lebih spesifik mencapai sekitar 469. Pernyataan ini memberikan gambaran tentang batasan jumlah penerima bantuan dalam suatu periode tertentu di Kabupaten Kendal, yang mana informasi ini diperoleh melalui wawancara yaitu:

“Kalau maksimalnya kan Kendal itu tergantung kuota dari awal ya mas. Kalau maksimalnya sekitar 700, lebih tepatnya tahun kemaren 600 berapa Iya sekitar 469.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal ini dibahas mengenai alokasi maksimal pembagian Kartu Jateng Sejahtera. Narasumber menjelaskan, jumlah maksimal penerima manfaat di Kabupaten Kendal bergantung pada kuota awal yang dialokasikan. Tahun lalu, jumlah maksimum penerima manfaat adalah sekitar 600 orang, dengan jumlah yang lebih tepat sekitar 469 orang. Pemahaman ini menyoroti alokasi yang telah ditentukan oleh pihak berwenang, menekankan pentingnya mengelola sumber daya secara efektif untuk memastikan bahwa program ini dapat membantu sebanyak mungkin orang, mungkin sambil

beroperasi dalam batasan kuota yang dialokasikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat dapat berubah sesuai dengan penyesuaian kebijakan atau sumber daya yang tersedia.

“Menurut surat itu dari dinsos provinsi pertama tama ada surat pemberitahuan untuk pencairan tahap 4 KJTS. Jadi setiap triwulan dikasih surat mas, terus dinsos kabupaten Kendal membikin surat tugas untuk TKSK untuk mendampingi pencairan, kenapa mas? Karena yang bersangkutan itu kena penyakit kronis. Kita dinas sosial juga kordinasi dengan bank Jateng karena untuk system pencairannya kemaren itu diwakilkan. Dibuat surat kuasa dan ada surat pokoknya mereka melengkapi berkas untuk pencairan KK maupun KTP yang bersangkutan, surat keterangan dari desa dan mereka dibawalah ke bank Jateng ,kita juga kordinasi sama bank Jateng untuk dapat dibantu pencairannya. Kadang ada yang keluarganya ngambil sendiri mas, jadi tidak semuanya didampingi, tetep diberi kesempatan sama TKSK, didampingi pak ini mau ini, atau diambil sekalian sama TKSK, dia juga punya surat tanda terimanya juga , nanti ada laporan, foto dokumantasi itu diupload.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal ini dijelaskan secara detail proses pembagian Kartu Jateng Sejahtera. Orang yang diwawancarai menguraikan pendekatan sistematis terhadap pencairan dana, menekankan bahwa penerima diberitahu setiap triwulan, dan setiap tahap memerlukan surat pemberitahuan dari departemen layanan sosial provinsi. Dinas Sosial kemudian menerbitkan surat tugas TKSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memudahkan pencairannya, khususnya bagi penderita penyakit kronis. Departemen bekerja sama dengan Bank Jateng untuk sistem pencairan, pembuatan surat kuasa, dan memastikan kelengkapan dokumen yang diperlukan seperti KK dan KTP. Penerima mempunyai keleluasaan untuk mengambil sendiri bantuannya atau didampingi oleh TKSK. Orang yang diwawancarai mencatat bahwa sistem ini

memungkinkan adanya dokumentasi yang komprehensif, termasuk foto prosesnya. Wawasan ini menyoroti pendekatan yang terkoordinasi dan terstruktur dalam menyalurkan bantuan, memastikan bahwa penerima menerima bantuan mereka sambil menjaga transparansi dan akuntabilitas sepanjang proses.

“Kuota dari provinsi ke kabupaten, dari kabupaten nanti menshare misal kita satu kabupaten dapat 100 orang. Disana ada berapa, disana adda berapa, nanti prioritas mana. Dari provinsi sudah prioritas waktu itu tapi sekarang tinggal 32 karena kan divalidasi, ada yang tidak layak sudah mendapat bantuan lainnya sampai oktober ini 32 orang untuk satu kecamatan.” (Wawancara dengan Camat Boja, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara ini, pembagian Kartu Jateng Sejahtera dikaji dalam konteks alokasi kuota. Orang yang diwawancarai menjelaskan bahwa proses alokasi kuota berasal dari tingkat provinsi dan kemudian disebarluaskan ke kabupaten, dan selanjutnya didistribusikan ke kecamatan. Prioritas diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria. Namun, orang yang diwawancarai mencatat bahwa jumlah penerima manfaat dapat berubah seiring berjalannya waktu karena proses validasi dan kebijakan yang terus berubah. Berdasarkan hasil wawancara, Kabupaten Boja memiliki 32 penerima manfaat untuk satu kecamatan, yang mencerminkan adaptasi program untuk memenuhi kriteria kelayakan terkini, memastikan bahwa bantuan diarahkan kepada mereka yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan sesuai kuota yang ditetapkan. Pemahaman ini menggarisbawahi sifat dinamis dari alokasi kuota program dan pentingnya mempertahankan kriteria kelayakan terkini untuk mendapatkan dukungan yang lebih tepat sasaran.

“Ndak ada jumlah maksimum pak penerima bantuan KJTS selama dia masuk kriteria dan ter ACC ya bisa menerima manfaat. Yang memberikan kuota

sebenarnya dari kabupaten. anane mung semene, ya ditambahi. Kie wis kakehan. Itu dari kabupetan.” (Wawancara dengan Camat Boja, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara ini dibahas mengenai alokasi bantuan Kartu Jateng Sejahtera. Narasumber menjelaskan bahwa tidak ada batasan maksimal penerima bantuan KJTS (Kartu Jawa Tengah Sejahtera), sepanjang memenuhi ACC (Kriteria Penerimaan Penerima Manfaat) dan layak menerima manfaat. Kuota distribusi ditentukan di tingkat kabupaten, sehingga jumlah penerima manfaat dapat fleksibel dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia di kabupaten tersebut. Wawasan ini mencerminkan pendekatan responsif terhadap dukungan, dimana kabupaten mempunyai otonomi untuk mengadaptasi program agar dapat mengakomodasi lebih banyak penerima manfaat berdasarkan keadaan setempat, memastikan bahwa bantuan diberikan kepada semua individu yang memenuhi syarat di kabupaten tersebut, sehingga menjadikan program lebih inklusif. dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

“KJTS bantuannya berupa uang, jadi kita ada uang dari donas, untuk mendampingi pencairan, surat tugas mendampingi pencairan, kemudian kita ke bank Jateng mengajukan dana tersebut, dicairkan kemudian diserahkan ke masing masing. Dan karena kita satu kecamatan satu orang, kadang kita memberikan kepercayaan pada desa, tolong sampaikan ke KPM ini.” (Wawancara dengan Camat Boja, 5 Oktober 2023)

Dalam wawancara ini diuraikan proses penyaluran bantuan Kartu Jateng Sejahtera. Narasumber menjelaskan, bantuan yang diberikan melalui KJTS (Kartu Jawa Tengah Sejahtera) berbentuk uang sehingga memerlukan koordinasi dan dana. Untuk memudahkan pencairannya, disiapkan surat tugas, dan pihak berwenang mendatangi Bank Jateng untuk meminta dana yang diperlukan. Setelah

dana diamankan, dana tersebut dicairkan dan diserahkan kepada masing-masing penerima. Orang yang diwawancarai juga menyebutkan adanya pelimpahan kepercayaan ke tingkat desa, sehingga memungkinkan mereka untuk menyampaikan bantuan kepada penerima manfaat yang berhak, sehingga menyederhanakan proses distribusi. Pemahaman ini menyoroti pendekatan sistematis dan berbagai tahapan yang terlibat dalam memastikan bahwa bantuan keuangan mencapai penerima yang dituju secara efektif dan efisien, dengan upaya kerja sama antara berbagai tingkat pemerintahan, termasuk desa-desa setempat, untuk memastikan kelancaran pencairan dana.

Kemampuan beradaptasi program ini terlihat jelas karena jumlah penerima manfaat berfluktuasi dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti prosedur validasi dan fluktuasi jumlah penerima manfaat akibat kematian. Camat menekankan komitmen penting pemerintah daerah untuk memastikan penerima bantuan yang memenuhi syarat menerima bantuan sosialnya. Meskipun menghadapi berbagai kendala, pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang teguh untuk memodifikasi program agar dapat secara efektif memenuhi kebutuhan masyarakat masing-masing. Kualitas kemampuan beradaptasi dan komitmen untuk melayani individu yang membutuhkan merupakan komponen penting bagi keberhasilan pelaksanaan program.

Maksimal alokasi penyaluran Kartu Jateng Sejahtera bergantung pada kuota awal yang telah ditetapkan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mengelola sumber daya secara efektif dan mematuhi kuota yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Kemampuan program untuk menyesuaikan jumlah penerima

manfaat sebagai respons terhadap perubahan kebijakan dan ketersediaan sumber daya terlihat jelas. Kemampuan beradaptasi program ini memungkinkan program untuk mengoptimalkan efektivitasnya dalam keterbatasan yang ada, sehingga memastikan jangkauan dan manfaat seluas mungkin bagi individu.

Proses penyalurannya, sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mengedepankan pendekatan pengalokasian dana yang metodis dan terbuka. Penerapan persyaratan pemberitahuan dan dokumentasi triwulanan berfungsi untuk membangun sistem yang kuat yang mendorong koordinasi dan akuntabilitas yang efektif. Kemitraan dengan Bank Jateng berfungsi untuk lebih mengoptimalkan efektivitas sistem distribusi. Lebih lanjut, pengakuan program terhadap kebutuhan praktis dan preferensi penerima manfaat terlihat dari kebebasan yang diberikan kepada penerima untuk mengumpulkan bantuan secara mandiri atau dengan bantuan TKSK. Kehadiran dokumentasi yang komprehensif dalam sistem ini berfungsi untuk mendorong transparansi dan menumbuhkan kepercayaan dalam operasional program.

Camat Boja memberikan penjelasan mengenai topik alokasi kuota, dengan menjelaskan asal muasal proses ini, yang dimulai di tingkat provinsi dan selanjutnya meluas ke kecamatan. Preferensi diberikan kepada individu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, yang menggarisbawahi pentingnya mematuhi prasyarat kelayakan. Kemampuan beradaptasi dan keselarasan program dengan kriteria kelayakan saat ini terlihat jelas dalam sifat dinamisnya, karena program ini mengakomodasi perubahan jumlah penerima manfaat akibat perubahan proses validasi dan kebijakan. Proses alokasi dirancang untuk secara efektif menyasar

individu yang benar-benar memenuhi kriteria yang ditentukan dan mematuhi kuota yang telah ditentukan.

3.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) Di Kecamatan Boja

3.2.1. Faktor Pendukung Implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) Di Kecamatan Boja

Distribusi Kartu Jawa Tengah Sejahtera dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang dapat dikelompokkan dalam empat kategori utama. Pertama, dalam aspek komunikasi (a), keberhasilan distribusi sangat tergantung pada efektivitas komunikasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, petugas distribusi, dan masyarakat penerima. Kedua, sumber daya (b) berperan penting dalam menentukan ketersediaan dan kelancaran distribusi. Mulai dari ketersediaan dana hingga keberadaan personel yang memadai, sumber daya yang cukup mendukung proses distribusi secara efisien. Ketiga, struktur birokrasi (c) menjadi faktor kunci yang mempengaruhi distribusi Kartu Jawa Tengah Sejahtera. Keteraturan dan koordinasi yang baik dalam struktur birokrasi dapat meningkatkan efisiensi distribusi. Terakhir, disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan (d) turut memengaruhi distribusi, di mana komitmen, tanggung jawab, dan responsifitas mereka terhadap kebutuhan masyarakat dapat mempercepat atau menghambat kelancaran distribusi bantuan sosial tersebut.

1. Komunikasi

Implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kecamatan Boja didukung oleh beberapa faktor kunci yang memperkuat kelancaran program tersebut. Salah satu faktor utama adalah kedisiplinan Tim Koordinasi Satu Kecamatan (TKSK) dalam menjalankan tugasnya. Meskipun selama periode sebelumnya terjadi kendala akibat miss komunikasi dan keberadaan penerima baru, TKSK tetap menjaga keteraturan dalam pelaksanaan tugasnya seperti yang dijelaskan oleh Pegawai Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal yaitu:

“Kalau selama ini kan yang TKSK tertib tertib mas, jadi dinas sosial tahun kemaren eh tahun ini awal itu karena ada miss komunikasi, ada yang baru jadi mereka gak bisa ngambil, terus komunikasi ke dinas sosial, bu ini kok gak bisa ngambil, gak bisa cair. Ternyata gak dicek. Kami kordinasikan ke bank jateng. Bank jateng bilang berkas beberapa belum lengkap misalnya apa nih, nah itu menyerahkannya Cuma salah satu KK, KTP. KK atau KTP kan milih salah satu ya mas, kalau disana gak KK dan KTP. Harus menyertakan KK dan KTP, sedangkan yang bersangkutan ODGJ kan susah, terus kan Cuma bisa melampirkan KK saja, kan ada surat keterangan ini bu kesalahan miss komunikasi segera diperbaiki. Ya sering komunikasi ke dinsospro. Ya sana juga cepet tanggapannya, kita didaerah gak sama, terkendalanya dimana, kita mencari solusi, memecahkan masalah itu, sampai sekarang gak ada masalah.” (Wawancara dengan Pegawai Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023)

Wawancara ini menampilkan Petugas Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal yang memaparkan berbagai faktor yang mendukung penerapan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kecamatan Boja. Narasumber menyoroti efektivitas TKSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan pendekatan sistematisnya terhadap program ini. Kolaborasi efektif antara lembaga pemerintah daerah dan lembaga keuangan, seperti Bank Jateng, mendapat pujian karena kecepatannya dalam mengatasi

permasalahan terkait komunikasi dan dokumentasi yang tidak memadai. Aspek positif dari program ini adalah kemampuan beradaptasinya dalam melayani penyandang disabilitas (ODGJ) dengan memberikan opsi untuk melampirkan kartu keluarga dan surat keterangan, meskipun mereka tidak memiliki dokumen lengkap. Pengamatan ini menyoroti pentingnya komunikasi yang transparan, pemecahan masalah yang efektif, dan kemampuan beradaptasi dalam mengatasi potensi tantangan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan KJTS, sehingga memberikan manfaat kepada penerimanya secara efisien dan dengan komplikasi yang minimal.

“Kita komunikasi tidak hanya terkait dengan penyaluran. Jadi pada saat penyaluran iya, pendataan iya, monitoring iya, ada banyak terkait dengan rapat rapat, rapat kordinasi dengan desa, akhir tahun mengadakan rapat evaluasi, dengan kabupaten kota kan terkait pencarian. Caranya ya lewat surat, lewat telfon, lewat grup wa, berbagai macam 88ar akita melaksanakan seperti itu.”
(Wawancara dengan Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 5 Oktober 2023)

Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi sebagai faktor krusial yang mendukung penerapan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kecamatan Boja. Orang yang diwawancarai menekankan bahwa komunikasi mencakup lebih dari sekedar proses distribusi dan mencakup berbagai elemen pengelolaan program, seperti pengumpulan data, pemantauan, dan evaluasi. Untuk memastikan kelancaran program, pertemuan rutin dan sesi koordinasi dilakukan dengan desa setempat dan tingkat administratif yang lebih tinggi sepanjang tahun. Pemanfaatan berbagai saluran komunikasi, seperti korespondensi tertulis, telepon, dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp,

berkontribusi terhadap optimalisasi upaya ini. Pengamatan ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dan koheren dalam pengelolaan program, mendorong kerja sama dan penyelesaian masalah di berbagai tingkat, dan pada akhirnya membantu keberhasilan pelaksanaan KJTS di Kabupaten Boja.

Meskipun komunikasi antara pihak terkait di Kecamatan Boja terjaga dengan baik, terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS). Salah satu kendala utama terkait dengan waktu penyaluran bantuan, di mana pelaksanaan kegiatan KJTS sering mengalami keterlambatan. Penyaluran yang seharusnya hanya untuk satu bulan dapat mengalami penundaan di beberapa daerah akibat berbagai kendala pelaksanaan seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yaitu:

“Hambatan komunikasi saya kira tidak ada, kalau hambatan terkait pelaksanaan kegiatan KJTS pasti ada. Contohnya aja terkait penyaluran, penyaluran kan kita target hanya untuk satu bulan, ternyata banyak daerah yang satu bulan molor, belum selesai kendala kendala seperti itu. untuk di program tadi sudah saya sampaikan kendala terkait pencairan, penyaluran terus kendala yang lain misalkan saja pencairan dah selesai kan kita harus buat laporan. Contohnya saja ada yang tidak tersalurkan namanya reduz, gak bisa dicairkan nanti masuk (16:58),, nanti bank Jateng setorkan lagi ke daerah, nanti laporan dari daerah ada yang terlambat juga. Contoh juga misalnya saja pencairan kan banyak yang diwakilkan oleh TKSK karena masa orang gila mau diajak ke bank, lah nanti bukti bukti kan kirim laporan, nanti ada yang terlambat. Lah itu kendala kendala program seperti itu. khusus komunikasi gak ada kendala, kita komunikasi dengan daerah intens sekali.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 5 Oktober 2023)

Narasumber mengakui bahwa tidak ada hambatan komunikasi, yang menunjukkan bahwa saluran komunikasi antara berbagai tingkat administratif dan wilayah terjalin dengan baik dan intensif. Namun terdapat hambatan yang

teridentifikasi terkait pelaksanaan program, khususnya terkait distribusi. Keterlambatan distribusi, yang melampaui jangka waktu yang ditargetkan yaitu satu bulan, telah terjadi di banyak daerah dan belum teratasi. Selain itu, permasalahan juga muncul selama proses pencairan, terutama ketika pencairan perlu dilakukan ulang, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan. Orang yang diwawancarai menyoroti tantangan dalam memastikan pencairan dana tepat waktu, terutama ketika penerima manfaat dengan kebutuhan khusus, seperti individu dengan masalah kesehatan mental, perlu dibawa ke bank. Pemahaman ini menggarisbawahi kompleksitas pelaksanaan program seperti KJTS, dimana tantangan logistik dan keterlambatan distribusi dan pelaporan dapat menghambat kelancaran pelaksanaannya, bahkan dengan adanya komunikasi yang efektif.

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya memainkan peran sentral dalam menentukan keberhasilan distribusi Kartu Jawa Tengah Sejahtera. Pendukungnya termasuk ketersediaan dana yang memadai untuk mendukung seluruh rangkaian proses distribusi, mulai dari produksi kartu hingga pengiriman ke penerima manfaat. Selain itu, keberhasilan distribusi juga bergantung pada ketersediaan personel yang memadai dengan keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan efisien. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai, seperti pusat distribusi dan teknologi informasi yang canggih, juga merupakan faktor pendukung distribusi yang efektif. Di sisi lain, penghambatnya termasuk keterbatasan sumber daya, baik dari segi dana maupun personel, yang dapat memperlambat atau

menghambat proses distribusi. Ketidakmampuan dalam manajemen sumber daya dapat mengakibatkan kekurangan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan distribusi Kartu Jawa Tengah Sejahtera secara menyeluruh.

“Kalau media itu banyak sih mas, ada Tribun ada medsos. Medsos banyak dari Instagram, facebook, ada temen temen yang nyampein di grup wa, bahkan ada tim yang meliput secara intensif, bahkan ada tiga tim. Timnya pak Rudi, dari Kominfo, ada dari Jakarta juga. Mbok jenengan mau melihat hasil dari liputan itu bisa terkait KJTS.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 5 Oktober 2023)

Narasumber menekankan paparan media yang komprehensif dari program ini, yang mencakup saluran konvensional seperti Tribune dan berbagai platform media sosial seperti Instagram dan Facebook. Platform-platform ini telah muncul sebagai media yang berharga untuk menyebarkan kesadaran dan informasi mengenai KJTS, yang mencakup banyak tim yang berkomitmen untuk melaporkan dan menyebarkan informasi terkini mengenai program tersebut. Upaya proaktif dari media dan tim media sosial, termasuk yang berbasis di Jakarta, memainkan peran penting dalam menyebarkan rincian dan hasil program secara efektif, sehingga memastikan bahwa inisiatif KJTS menjangkau khalayak yang lebih luas dan mendapatkan pengakuan sebagai upaya penting bagi masyarakat. Pengamatan ini menyoroti pentingnya media dan saluran komunikasi dalam menghasilkan pengaruh positif dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai program bantuan sosial seperti KJTS di Kecamatan Boja.

“TKSK memang tenaga relawan yang merupakan SDM dari kemensos, SK nya dari kemensos, secara resmi secara formal ada SK, nya yang mengesahkan dari kemensos, tapi kita yang ada didaerah juga cari cari. Selain menggunakan jasa dari TKSK kita juga memfasilitasi, dikabupaten kota juga memfasilitasi entah transfer atau apa. Kita selain menggunakan tenaga kerjanya juga reward lah

untuk TKSK.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 5 Oktober 2023)

Narasumber menjelaskan bahwa TKSK merupakan tenaga sukarela yang terdiri dari sumber daya manusia Kementerian Sosial dan disahkan secara resmi oleh Kementerian. Namun di tingkat daerah, mereka juga aktif mengupayakan dan menjalin hubungan dengan TKSK. Selain memanfaatkan layanan TKSK, mereka memfasilitasi transfer dan prosedur lain yang diperlukan di kabupaten kota. Selain itu, narasumber menyebutkan bahwa imbalan diberikan kepada TKSK, yang selanjutnya memberikan insentif bagi partisipasi mereka dalam program ini. Wawasan ini menggarisbawahi pendekatan kolaboratif dan multifaset dalam mobilisasi tenaga kerja, memastikan bahwa KJTS dan program bantuan sosial lainnya dilaksanakan secara efektif dengan dukungan relawan yang berdedikasi dan koordinasi aktif antara berbagai tingkat administratif.

“Kalau menyebarkan berita ya dari dinas sosial tidak, tapi dinsos mempunyai tim PPID, informasi public itu loh. Kan kita tidak hanya kegiatan KJTS. Kegiatan apapun semua kegiatan yang ada di dinas itu diliput, jenengan bisa lihat hasil liputannya di youtube, facebook ada, tim kita memang sudah professional. Alhamdulillah kemarin tahun 2022 kita dapat peringkat di Jateng, itu yang meliput segala aktifitas kegiatan sosial. Jadi jenengan bisa lihat sebelum masuk di dinas sosial kan ada pintu masuk itu, ditempat resepsionis itu kan ada ya, jenengan bisa lihat sebentar, itu kegiatan kegiatan yang ada di dinas sosial, termasuk salah satunya KJTS itu. sebelah kanan lab itu .” (Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 5 Oktober 2023)

Menurut narasumber, lembaga pelayanan sosial telah membentuk tim khusus yang disebut tim Penyebarluasan Informasi Publik dan Publik (PPID) yang bertugas mengelola dan menyebarkan informasi publik. Tim ini secara efektif menyebarkan informasi mengenai beragam kegiatan, termasuk program Kartu

Jawa Tengah Sejahtera (KJTS), melalui berbagai platform seperti YouTube dan Facebook. Profesionalisme tim telah diakui dan upaya mereka mendapat pengakuan, terbukti dengan pemeringkatan departemen di Jawa Tengah dalam cakupan kegiatan sosial yang komprehensif. Penyediaan bahan informasi publik di pintu masuk dan area penerimaan pelayanan sosial meningkatkan aksesibilitas informasi mengenai KJTS dan inisiatif terkait lainnya kepada masyarakat umum. Pengamatan ini menyoroti pentingnya komunikasi yang baik dan keterbukaan dalam memajukan program-program sosial, yang menjamin bahwa masyarakat mendapat informasi yang cukup tentang layanan dan kegiatan yang dapat diakses.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memainkan peran penting dalam keberhasilan distribusi Kartu Jawa Tengah Sejahtera. Sebagai faktor pendukung, keteraturan dan koordinasi yang baik dalam struktur birokrasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi. Ketetapan peran dan tanggung jawab tiap unit dalam rantai distribusi memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan dengan tepat, mengurangi risiko kesalahan atau kebocoran informasi. Sistem hierarki yang jelas juga mendukung komunikasi yang efektif antara berbagai tingkatan pemerintahan, dari tingkat pusat hingga tingkat lokal, mempercepat aliran informasi terkait distribusi bantuan sosial. Sementara itu, sebagai faktor penghambat, struktur birokrasi yang kurang fleksibel atau terlalu kompleks dapat menghambat respons cepat terhadap perubahan kondisi atau kebutuhan masyarakat. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antarunit kerja dapat menciptakan

hambatan administratif yang menghambat kelancaran distribusi Kartu Jawa Tengah Sejahtera.

“Program KJTS memang bantuan uang ya, bansos. Bansos uang tunai gak ada bantuan yang lain, bahkan penerimanya itu kan orang yang non produktif, jadi tidak mungkin diberikan bantuan yang lain yang tidak berupa uang, misal keterampilan atau usaha kue ya ndak mungkin, kalau misal dikasih kue, bisa dodol, bisa dandan dandan apa ya malah salah, gak sesuai dengan kriteria malah yang mendapat bantuan itu yang benar benar non produktif, gak bisa diberdayakan lagi.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 5 Oktober 2023)

Menurut narasumber, program KJTS menawarkan bantuan sosial berupa uang kepada individu yang tidak memberikan kontribusi terhadap produktivitas dan memenuhi persyaratan kelayakan tertentu. Oleh karena itu, pemberian bantuan alternatif seperti peningkatan keterampilan atau dukungan usaha kecil dianggap tidak layak karena hal ini tidak sejalan dengan tujuan program. Pengamatan ini menggarisbawahi kendala yang melekat pada program ini, karena program ini sebagian besar berfokus pada individu yang tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam upaya ekonomi. Meskipun program ini cukup memenuhi kebutuhan keuangan kelompok demografis ini, program ini mungkin tidak secara efektif mendorong pemberdayaan atau peningkatan keterampilan mereka, sehingga menimbulkan hambatan dalam kaitannya dengan kemajuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

“...dinas sosial itu banyak yang pensiun. Saya sendiri gak ada anak buah loh, jadi kalau mau kelapangan juga susah, paling kita cuman dekat dekat sini. Kadang provinsi mau ini juga ke sini, ya kita mendampingi. Kita kelapangan juga, jadi tau bagaimana mereka juga.” (Wawancara dengan Pegawai Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Petugas Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Kendal, ditemukan kendala signifikan yang menghambat keberhasilan penerapan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS). Kendala ini berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja dan ruang kantor. Orang yang diwawancarai menyoroti fakta bahwa sejumlah besar pekerja layanan sosial sedang mencapai usia pensiun, sehingga menunjukkan potensi kekurangan sumber daya manusia di departemen tersebut. Situasi di atas dapat menimbulkan kesulitan dalam kemampuan menangani beban kerja dan mengoptimalkan pelaksanaan program. Lebih jauh lagi, orang yang diwawancarai menyoroti tantangan yang terkait dengan perolehan ruang kantor yang memadai, yang dapat berdampak buruk pada kapasitas mereka untuk melaksanakan program secara efisien. Adanya keterbatasan logistik, selain kekurangan tenaga kerja, dapat menghambat kelancaran pelaksanaan program bantuan sosial seperti KJTS. Hal ini menyoroti pentingnya mengalokasikan sumber daya dan terlibat dalam perencanaan strategis untuk mengatasi kendala-kendala ini secara efektif.

“TKSK itu sukarela mas. Dulu kan dari kemensos mas, sama halnya dengan PKH, kalau PKH kan ada kriteria juga, kalau TKSK pure relawan. Urutannya kan dari desa ke TKSK ke dinas sosial baru ke provinsi, nah provinsi disana diolah, disana kan ada beberapa kabupaten. Setelah itu kalau mau pencairan liat dari provinsinya, pemberitahuan ke kabupaten, pencairan seperti itu, nah kabupaten kembali lagi ke TKSK.” (Wawancara dengan Pegawai Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023)

Wawancara ini menggali faktor penghambat yang terkait dengan implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS), khususnya mengkaji sifat sukarela dari

tenaga kerja TKSK (Unit Pelaksana Teknis Kesejahteraan Sosial). Menurut narasumber, meskipun program seperti PKH (Program Keluarga Harapan) telah menetapkan kriteria, TKSK beroperasi berdasarkan partisipasi relawan. Urutan pelaksanaannya mencakup berbagai tingkat administrasi, dimulai dari tingkat desa, sehingga menimbulkan kerumitan dan kemungkinan hambatan dalam prosedur pencairan dana. Pengamatan ini menyoroti kesulitan yang timbul karena ketergantungan pada tenaga kerja sukarela dan kerangka administrasi yang berlapis-lapis ketika melaksanakan program bantuan sosial seperti KJTS. Tantangan-tantangan tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu penyaluran program di Kecamatan Boja.

“Selama ini kita seringkali koordinasi sama kordinator TKSK, setiap kabupaten mesti kan punya nah itu kita komunikasinya dengan kordinatornya, pak nyuwun sewu ini mau ada pencairan suratnya ini ini, nah gitu. Untuk kelengkapan dan berkas berkas disiapkan ya pak, terus BNBA yang bersangkutan disuruh mengunduh dibitly, dari dinsos provinsi sudah menyiapkan nih BNBA nya.”
((Wawancara dengan Pegawai Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023))

Narasumber menyoroti pentingnya koordinasi dalam memfasilitasi implementasi program yang efektif. Namun, mereka mencatat bahwa proses ini seringkali memerlukan beberapa tahapan, seperti persiapan dokumen dan penggunaan BNBA (Pendapatan dan Belanja Non-Anggaran), yang dapat menimbulkan kerumitan dalam proses pencairan dana. Pengamatan ini menyiratkan bahwa adanya prosedur administratif dan mekanisme koordinasi, meskipun penting untuk menjaga integritas program, juga dapat menimbulkan

hambatan dan penundaan birokrasi yang mungkin menghambat efektivitas pelaksanaan program KJTS di Kecamatan Boja.

4. Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap distribusi Kartu Jawa Tengah Sejahtera. Sebagai faktor pendukung, sikap yang positif, komitmen, dan tanggung jawab dari para pelaksana kebijakan dapat mendorong pelaksanaan distribusi dengan efisien. Disposisi yang baik juga mencakup responsifitas terhadap kebutuhan masyarakat, memastikan distribusi bantuan sosial sesuai dengan dinamika dan perubahan di lapangan. Sebaliknya, sebagai faktor penghambat, sikap yang kurang responsif, kurangnya komitmen, atau ketidakpedulian dari para pelaksana kebijakan dapat menghambat kelancaran distribusi. Keterlambatan atau ketidakberlanjutan distribusi dapat terjadi jika para pelaksana kebijakan tidak memiliki kesadaran yang cukup terhadap urgensi dan pentingnya bantuan sosial yang disalurkan melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera. Oleh karena itu, pembentukan disposisi yang positif dan proaktif menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan distribusi bantuan sosial tersebut.

“Saya kira kendala pasti ada dimana program itu pasti ada, kendalanya seringnya itu dilapangan, masyarakat 97ar ak akan diberikan, penerima adalah orang orang yang tidak sehat satu, kedua orang orang gila, mental kan, kemudia belum tentu ada orangnya, dan gak mungkin diberikan kepada orangnya, maksudnya kan diberikan kepada keluarganya, jadi memang kendalanya semacam itu aja. Jadi yang membantu mengambil di bank itu kendalanya biasanya keluyuran, mencarinya biasanya sulit. Kendalanya itu saja.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 5 Oktober 2023)

Narasumber menggarisbawahi pengakuan atas keberadaan dan signifikansi program, dengan memberikan penekanan khusus pada fakta bahwa Sebagian besar hambatan umumnya ditemui dalam bidang praktis. Tantangan-tantangan yang disebutkan di atas terutama berkaitan dengan tugas untuk secara efektif menjangkau individu-individu penyandang disabilitas, kondisi 98ar akita mental, atau yang mungkin tidak dapat hadir selama proses distribusi. Dalam kondisi seperti ini, program beradaptasi dengan memberikan dukungan kepada keluarga, sehingga menjamin bahwa bantuan tersebut tersalurkan secara efektif kepada penerima yang dituju. Permasalahan utama yang diidentifikasi berkaitan dengan kesulitan 98ar akit yang terkait dengan identifikasi dan pendistribusian bantuan kepada para penerima manfaat. Meskipun tugas ini mungkin menimbulkan tantangan, hal ini tidak mengurangi tekad untuk memberikan bantuan di bidang-bidang yang memerlukannya. Hasil ini menyoroti komitmen program dalam mengatasi tantangan, seperti tantangan yang berkaitan dengan aksesibilitas penerima manfaat, agar KJTS dapat dilaksanakan secara efektif dan memperluas jangkauannya ke sejumlah individu yang memenuhi syarat.

“Kalau itu terkait program KJTS untuk masyarat sesuai kriteria tersebut. Tanggapannya sangat banyak dan sangat positif , kemaren timnya pak itu program KJTS kan program prioritas provinsi Jateng mulai tahun 2017, sangat sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang bener bener membutuhkan, jadi saya kira terkait browsing KJTS dan sebagainya disitu ada berita yang menarik terkait program KJTS.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 5 Oktober 2023)

Hasil wawancara menekankan besarnya respon masyarakat terhadap program Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS), yang merupakan salah satu faktor pendukungnya. Menurut narasumber, program KJTS telah ditetapkan sebagai

program prioritas Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2017. Program ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dan terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Penerimaan yang baik terhadap program ini menunjukkan pentingnya program ini dan pengaruh signifikannya terhadap kesejahteraan orang-orang yang memperoleh manfaat dari program ini. Keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan dan apresiasi masyarakat yang menandakan adanya kesesuaian antara KJTS dengan kebutuhan warga yang membutuhkan di Kecamatan Boja. Oleh karena itu, penyelarasan ini akan meningkatkan efektivitas program dalam mengatasi hambatan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

“Ya istilahnya fungsinya PPID termasuk pelayan public, tidak hanya menginfokan, kalau ada complain complain terkait masyarakat yang ngolah dia, dia yang menyampaikan oh ini ada aduan masyarakat ke pak kadus atau ke siapa. Atau oh ini dishare ke danasos nanti ditindaklanjuti, oh ini dishare ke dinasos.”
(Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kendal, 5 Oktober 2023)

Narasumber menyoroti sifat multifaset dari peran PPID, yang lebih dari sekedar penyebaran informasi dan mencakup tanggung jawab penting dalam menangani dan menyelesaikan keluhan masyarakat. Apabila timbul keluhan atau kekhawatiran mengenai penanganan individu dalam program, maka Departemen Pengolahan dan Pelaksana Program (PPID) mempunyai tugas untuk mengkomunikasikan hal ini secara efektif kepada badan pengelola yang berwenang, seperti pengawas daerah atau Kementerian Penerangan Masyarakat. Urusan Sosial. Penerapan pendekatan proaktif ini menjamin bahwa masukan dari masyarakat diakui sebagaimana mestinya dan bahwa langkah-langkah yang tepat

diambil untuk meningkatkan program. Pernyataan di atas menekankan dedikasi program untuk mendorong transparansi dan daya tanggap. Departemen Hubungan Pemerintah-Swasta (PPID) memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi antara masyarakat umum dan badan-badan pemerintahan, sehingga meningkatkan efektivitas program dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntabilitas yang telah ditetapkan.

“Kalau dinsos kan pelaksana ya, mengembanka tugas dari atasan ya tetep kita siap melaksanakan, berharap ya karena program ini bagus ya bantuan KJTS ya lanjut , pencentusnya pak Ganjar kan sudah lengser. Ini bagus dan bermanfaat untuk masyarakat jateng ya harapannya berlanjut. Apalagi program KJTS ini dinamakan program sapu jagat, artinya orang yang non produktif kita tangani semua, nah itu ada gegetnya istilahnya. Kalau yang produktif kan biasa, kalau yang non produktif kan membutuhkan banget.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 5 Oktober 2023)

Wawancara dengan Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya dedikasi dan antusiasme yang tinggi terhadap program Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS). Orang yang diwawancarai menekankan bahwa organisasi layanan sosial menganggap dirinya sebagai pelaksana program, dan mereka siap untuk memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh atasan mereka. Para pendukung program ini menggarisbawahi manfaat dan kepraktisan program ini bagi masyarakat yang tinggal di Jawa Tengah, dan pada saat yang sama menyatakan optimisme akan keberlanjutan program ini. Konsep "program penyisiran universal", yang mencakup individu yang tidak terlibat dalam kegiatan produktif, dianggap sangat merangsang dan menunjukkan komitmen program terhadap inklusivitas. Tujuan program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan individu paling rentan di masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan,

menunjukkan komitmen dan dedikasi yang kuat untuk melayani individu non-produktif. Hal ini menggarisbawahi tujuan program untuk memberikan dampak positif pada kehidupan mereka. Pengamatan ini menunjukkan betapa nyata semangat dan dedikasi dinas sosial dalam menjamin efektivitas dan keberlanjutan program KJTS di Kecamatan Boja.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diringkas terkait factor pendukung dan penghambat implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kecamatan Boja, yaitu:

1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kecamatan Boja sangat bervariasi dan penting dalam memastikan keberhasilan program ini. Berikut adalah beberapa poin diskusi mengenai faktor-faktor pendukung tersebut:

a) Efektivitas TKSK dan Pendekatan Sistematis

TKSK (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) telah membuktikan efektivitasnya dalam program KJTS. Pendekatan sistematis yang diterapkan oleh TKSK dalam proses identifikasi dan validasi calon penerima adalah kunci untuk memastikan bahwa bantuan sosial mencapai yang tepat sasaran. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan, seperti Bank Jateng, juga memungkinkan penanganan permasalahan terkait komunikasi dan dokumentasi dengan cepat.

b) Komitmen terhadap Penerima Berkebutuhan Khusus

Program KJTS menunjukkan komitmen dalam melayani penyandang disabilitas (ODGJ) dan individu dengan kondisi kesehatan mental yang memerlukan dukungan. Bahkan ketika ada kendala praktis yang menghambat distribusi langsung kepada individu ini, program beradaptasi dengan memberikan dukungan kepada keluarga mereka, memastikan bantuan tersalurkan secara efektif. Hal ini mencerminkan inklusivitas program.

c) Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik antara berbagai tingkat pemerintahan adalah faktor penting dalam mendukung program KJTS. Pertemuan rutin, sesi koordinasi, dan penggunaan berbagai saluran komunikasi memastikan kelancaran program, pengumpulan data yang baik, pemantauan, dan evaluasi.

d) Respon Positif Masyarakat

Dukungan dan apresiasi masyarakat terhadap program KJTS memainkan peran penting dalam keberhasilan program ini. Program ini telah mendapatkan antusiasme yang tinggi dan dianggap bermanfaat oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Respon positif ini mengindikasikan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.

e) Paparan Media dan Informasi Publik

Upaya media dalam menyebarkan informasi mengenai KJTS melalui berbagai platform, termasuk media sosial, telah membantu meningkatkan kesadaran dan pengaruh program. Informasi yang dikelola dan disebar oleh tim Penyebarluasan Informasi Publik dan Publik (PPID) menjadi penting

dalam memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat dan menangani keluhan serta masukan dari masyarakat secara efektif.

Dalam keseluruhan wawancara, terlihat bahwa dedikasi, komunikasi efektif, adaptabilitas, dan komitmen terhadap inklusivitas adalah faktor kunci yang mendukung implementasi sukses Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kecamatan Boja. Program ini menggambarkan upaya yang komprehensif dan kolaboratif untuk memastikan bahwa bantuan sosial mencapai individu yang membutuhkannya secara efisien dan dengan komplikasi yang minimal.

2) Faktor Penghambat

Dalam konteks implementasi Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJTS) di Kecamatan Boja, sejumlah faktor penghambat telah diidentifikasi melalui wawancara dengan narasumber. Faktor-faktor ini mencakup:

a) Keterlambatan Distribusi

Salah satu hambatan yang signifikan adalah keterlambatan dalam distribusi bantuan sosial, yang sering kali melebihi batas waktu yang ditargetkan. Hal ini terutama menjadi permasalahan ketika penerima manfaat harus hadir langsung ke bank, terutama individu dengan kebutuhan khusus. Keterlambatan ini dapat menyebabkan frustrasi di antara penerima manfaat dan dapat menghambat pelaporan yang tepat waktu. Menyusun strategi untuk mengatasi hambatan logistik ini menjadi penting.

b) Kekurangan Tenaga Kerja dan Ruang Kantor

Wawancara yang dilakukan di Distrik Boja mengungkapkan kekhawatiran mengenai kekurangan sumber daya manusia di departemen layanan sosial, dimana banyak pekerja mendekati usia pensiun. Kekurangan tenaga kerja ini mengakibatkan tertundanya pelaksanaan program KJTS, serta kesulitan dalam mengelola beban kerja administrasi. Selain itu, terdapat kekurangan ruang kantor, sehingga sulit untuk mengakomodasi semakin banyaknya staf yang dibutuhkan untuk mengelola program.

c) Kompleksitas Administrasi

Proses pelaksanaan program KJTS di Kecamatan Boja melibatkan prosedur administrasi yang memerlukan beberapa tahapan, seperti penyiapan dokumen dan penggunaan BNBA (Pendapatan dan Belanja Non-Anggaran). Prosedur-prosedur ini rumit dan memakan waktu, sehingga menyebabkan tertundanya implementasi program. Kompleksitas administrasi program KJTS juga mengakibatkan kesulitan dalam mengelola anggaran dan sumber daya program secara efektif.

d) Ketergantungan pada Tenaga Kerja Sukarela

Proses pelaksanaan program KJTS di Kecamatan Boja bertumpu pada tenaga kerja sukarela, seperti TKSK yang beroperasi berdasarkan partisipasi sukarelawan. Ketergantungan pada tenaga kerja sukarela telah menimbulkan tantangan dalam mengelola program secara efektif, karena relawan mungkin tidak selalu tersedia atau memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan peran mereka secara efektif.

Selain itu, ketergantungan pada tenaga kerja sukarela mempersulit upaya memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.